

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN
RAKYAT DI KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI**
*(Policy Implementation Strategy of Community Plantation Forest
in Sarolangun Regency, Jambi)*

Oleh/By :

Dewi Febriani¹, Dudung Darusman², Dodik Ridho Nurrochmat³, Nurheni Wijayanto⁴

¹Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2

Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, Telp. 021 5730318, Email: wienny2000@yahoo.com

^{2,3,4}Fakultas Kehutanan IPB, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga
Telp. (0251) 8621677/8621256

Diterima 15 Maret 2012, disetujui 14 Mei 2012

ABSTRACT

Community Plantation Forest is Indonesian government policy which needed participation and responsibility from local community to manage production forest sustainability. Studies on capacity of community as prominent agent are needed. The objectives of this study are: (1) to assess the physical capital, human capital and social capital of communities and to identify their participation in HTR program; (2) to analyze the correlation between physical capital and human capital with elements of social capital, and between social capital with their participation in HTR; and (3) to develop implementation strategy of HTR. Analysis of data used descriptive method, Spearman rank correlation, SWOT and QSPM. Necessary information for this study came from a survey of 81 households from Taman Bandung, Seko Besar and Lamban Sigatal villages in Sarolangun Regency, Jambi. The results showed that physical capital, human capital and social capital are included in medium category. No correlation between physical capital and social capital, but there are correlation between social capital and human capital and participation. The study also showed that selected strategy in HTR implementation are: (1) accommodate exiting community models in forest land as community motivation; (2) optimize local government support to accelerate license process, assistance, and intensive socialization about HTR; and (3) use timber scarcity issues and PT Samhutani as market opportunity issues to stimulating community to plant timber.

Keywords: Hutan Tanaman Rakyat, Social capital, Sarolangun

ABSTRAK

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang membutuhkan partisipasi dan tanggungjawab dari masyarakat lokal untuk mengelola hutan produksi secara berkelanjutan. Penelitian terhadap kapasitas masyarakat sebagai pemeran utama dalam kebijakan ini sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian adalah: (1) mengukur modal fisik, modal manusia dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program HTR; (2) menganalisis hubungan antara modal fisik dan modal manusia terhadap elemen dari modal sosial dan antara modal sosial dengan tingkat partisipasi masyarakat; dan (3) membangun strategi implementasi kebijakan HTR. Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, korelasi peringkat Spearman, SWOT dan QSPM. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil survei

terhadap 81 kepala keluarga dari Desa Taman Bandung, Seko Besar dan Lamban Sigatal di Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal fisik, modal manusia dan modal sosial dalam katagori sedang. Tidak ada korelasi antara modal fisik dan modal sosial, namun terdapat korelasi antara modal sosial dengan modal manusia. Strategi terpilih dalam mengimplementasikan kebijakan HTR adalah: (1) Mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan HTR; (2) Mengotimalkan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi melalui pendampingan dan sosialisasi secara intensif; dan (3) Menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran ke PT Samhutani sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu.

Kata kunci: Hutan tanaman rakyat, modal sosial, Sarolangun

I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2007 Kementerian Kehutanan menggulirkan kebijakan pemanfaatan hutan produksi berbasis masyarakat melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.23/Menhut-II/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, yang kemudian digantikan dengan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011. Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ini membuka akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan produksi secara legal. Dalam Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011, hutan tanaman rakyat (HTR) didefinisikan sebagai hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan penetapan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Kebijakan ini lahir pada saat kebijakan sejenis mengalami kegagalan dalam implementasinya, baik kebijakan yang menyangkut pemanfaatan hutan produksi maupun kebijakan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan Pemerintah dalam rangka pemanfaatan hutan produksi, antara lain: kebijakan pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) yang dinilai gagal mempertahankan kelestarian hutan dan pembangunan

hutan tanaman industri (HTI) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kayu. Kebijakan pemberdayaan juga tidak berhasil memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Kebijakan pemberian hak pengusahaan hutan kepada pihak swasta dinilai gagal mengimplementasikan dasar-dasar pengelolaan hutan berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan hutan Indonesia. Data yang ada memperlihatkan bahwa hutan yang mengalami rusak berat akibat sistem HPH sampai Juni 1998 seluas 16.57 juta ha (Kartodihardjo & Supriono, 1999). Data dari *Forest Watch Indonesia* (2002) menunjukkan bahwa pada tahun 1950-an luas hutan di Indonesia mencapai 84% dari total luas daratan, namun ditahun 1989 luas hutan telah menurun menjadi 60%.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa pada periode 1985-1997 laju deforestasi dan degradasi di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar pertahun. Periode 1997-2000 laju deforestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai rata-rata sebesar 2,8 juta hektar dan menurun kembali pada periode 2000-2005 menjadi sebesar 1,08 juta hektar. Statistik Kehutanan Indonesia 2010 menunjukkan bahwa total deforestasi di dalam dan luar kawasan hutan periode 2006-2009 mengalami penurunan menjadi 832.126,9 ha/tahun (Kemenhut 2011).

Pada akhir tahun 1980, pemerintah menginisiasi pola hutan tanaman dalam rangka mempertahankan produksi kayu. Kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun karena kinerja pembagunan HTI yang rendah, upaya tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kayu. Kartodihardjo & Supriono (1999) menyebutkan bahwa hingga bulan Juli 1997 realisasi pembangunan HTI hanya mencapai 23,1%. Data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa hingga tahun 2004, luas tanaman HTI hanya mencapai 3,25 juta ha atau 56% dari target yang ditetapkan pada tahun 1994 yaitu seluas 5,8 juta ha (Departemen Kehutanan, 2006).

Kebijakan kehutanan lain yang juga dianggap kurang berhasil dalam hal implementasi adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kebijakan kehutanan sosial yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, tidak berjalan mulus dan belum memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Berbagai wacana menyebutkan bahwa kendala yang timbul akibat adanya gap antara tujuan Pemerintah dan keinginan masyarakat.

Kebijakan yang telah diambil Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, antara lain: kebijakan HPH Bina Desa Hutan, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diusung Perum Perhutani. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum berhasil memberdayakan masyarakat.

Awang (2007) menyebutkan bahwa HPH Bina Desa Hutan (BHD) mengalami kegagalan akibat BHD lebih berpihak kepada kepentingan Pemerintah dibandingkan kepentingan masyarakat. Purwoko (2002) menjelaskan bahwa secara teknis, paket-paket kegiatan kehutanan masyarakat, seperti PMDH tidak mengoptimalkan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan, namun lebih

berupa pelayanan sosial (seperti bantuan-bantuan sosial, pendidikan masyarakat, usaha kecil, dan sebagainya) sebagai *lip service* dari pengusaha. Kebijakan ini terkesan hanya sebagai upaya Pemerintah dalam merendam potensi konflik yang terjadi akibat kesenjangan ekonomi antara pengusaha HPH dan Perhutani dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat lain yang dikeluarkan Pemerintah adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Capable (2002) dalam Awang (2007) menyebutkan bahwa kendala dalam implementasi kebijakan HKm terletak pada kelembagaan. Awang (2007) menambahkan bahwa kendala HKm juga terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.

Namun kondisi ini (hutan produksi yang rusak dan secara *de facto* menjadi open akses, akses masyarakat terhadap hutan produksi yang rendah dan masyarakat yang belum diberdayakan secara optimal), justru dapat dijadikan alasan untuk menjadikan kebijakan HTR sebagai langkah besar dalam mengatasi permasalahan kehutanan saat ini. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat ini dirasakan cukup tepat dalam menyikapi problema yang terjadi di bidang kehutanan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan hutan tanaman rakyat agar tidak berujung kepada kegagalan sebagaimana yang terjadi pada kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Awang *et al.* (2001) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan rakyat (termasuk hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat) sesungguhnya sangat terdesentralisasi dan *local specific* sehingga tidak mudah untuk digeneralisasi. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan hutan tanaman rakyat diperlukan pemahaman mengenai karakteristik sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat,

termasuk pemahaman mengenai modal-modal yang dimiliki oleh masyarakat seperti modal fisik, modal manusia dan modal sosial. Modal manusia sangat penting, karena modal usaha tidak hanya berwujud fisik saja, melainkan akan didominasi oleh modal manusia seperti pendidikan, keterampilan dan kecerdasan hubungan (Coleman, 1988; Fukuyama, 2007). Keahlian, kemampuan, pengetahuan dan sikap merupakan bagian dari mutu modal manusia yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi (Hardjanto, 2002).

Modal sosial bisa melekat pada individu manusia dan juga bisa merupakan hasil interaksi sosial dalam bentuk jaringan sosial (Alder & Seok, 2002). Modal sosial penting untuk dipertimbangkan karena masyarakat tidak hanya berupa sekumpulan manusia yang secara fisik telah bersama dalam kurun waktu tertentu melainkan terdapat semangat atau ruh yang memperkuat kehidupan kolektif (Pranadji, 2006). Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi, cenderung bekerja secara bergotong royong, bebas bicara dan mampu mengatasi perbedaan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki modal sosial yang rendah akan tampak adanya kecurigaan, pengelompokan, tidak ada kepastian hukum dan keteraturan sosial (Suharto, 2007). Oleh karena itu, guna mencapai tujuan perlu menambahkan modal sosial pada setiap kebijakan (Weyerhaeuser *et al.*, 2006). Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan menilai modal fisik, modal manusia dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dalam implementasi kebijakan HTR; (2) Mengukur dan menganalisis hubungan antara modal fisik dan modal manusia dengan modal sosial; dan antara modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan HTR; dan (3) Membangun strategi implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni - Desember 2011 di tiga desa yang terletak di sekitar areal pencadangan HTR yaitu Desa Taman Bandung, Desa Lamban Sigatal dan Desa Seko Besar yang berada di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa (1) lokasi terletak satu hamparan dan berbatasan dengan areal pencadangan HTR; (2) bentuk ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) HTR yang diajukan dan telah didapatkan adalah ijin perorangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Khusus untuk modal sosial, instrumen yang digunakan adalah modifikasi dari *Social Capital Assessment Tool* (Krishna dan Shrader, 1999) dengan *Measuring Social Capital an Intergrated Questionnaire* (Grootaert *et al.*, 2004) serta panduan wawancara untuk analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Treaths*) dan QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*). Responden berjumlah 81 KK yang dipilih secara acak dari populasi 856 KK, sedangkan informan kunci diperoleh berdasarkan *snowball sampling*.

Pengolahan dan analisis data meliputi: (1) Analisis deskriptif untuk unsur-unsur modal fisik, modal manusia dan modal sosial; dan tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi HTR; (2) Analisis kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara unsur-unsur pembentuk modal fisik dan modal manusia dengan modal sosial; dan antara modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan uji koefisien peringkat Spearman; dan (3) Analisis strategi implementasi kebijakan HTR melalui tiga tahap,

yaitu: pengumpulan data, analisis SWOT dan pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis QSPM (Rangkuti, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modal Fisik

Modal fisik dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) kepemilikan lahan responden yang berada dalam areal pencadangan areal; (2) ketersediaan areal apabila masyarakat ingin mengajukan/menambah ijin HTR; dan (3) keberadaan tanaman dalam areal yang akan/sudah diajukan untuk mendapatkan ijin HTR. Modal fisik yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi penelitian dalam implementasi HTR termasuk dalam kategori sedang (80,25%). Hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan lahan yang tinggi (62,96%), ketersediaan areal rendah (45,68%) dan keberadaan tanaman yang tinggi (41,97%).

Kepemilikan lahan responden yang berada dalam kawasan areal pencadangan HTR termasuk dalam kategori tinggi (62,96%) karena hampir semua responden memiliki lahan yang berada dalam areal pencadangan HTR, meskipun belum semua responden telah memiliki ijin IUPHHK-HTR. Total kepemilikan lahan rata-rata responden di dalam kawasan pencadangan HTR seluas 4,99 ha. Namun status kepemilikan secara legal sebagian besar responden masih belum jelas karena hasil verifikasi lahan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Bangka Belitung belum diketahui.

Pada umumnya lahan yang diakui sebagai milik mereka merupakan kawasan hutan yang telah diokupasi dengan cara membuka hutan untuk perladangan, membeli atau merupakan warisan dari orang tuanya yang dulu membuka hutan di daerah tersebut. Sebagai bukti kepemilikan, umumnya lahan

tersebut ditanami dengan tanaman karet sehingga keberadaan tanaman cukup tinggi (41,97%). Kepemilikan ini diakui dan dihormati di lapangan oleh masyarakat sekitar walaupun dengan batas-batas yang sumir.

Dengan pola seperti di atas, maka keikutsertaan masyarakat terhadap HTR dibatasi oleh adanya kepemilikan lahan masyarakat dalam areal lokasi pencadangan HTR. Masyarakat yang tidak memiliki lahan dalam areal pencadangan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan HTR meskipun mereka memiliki keinginan untuk berpartisipasi. Hal ini berdampak kepada ketersediaan lahan yang termasuk dalam kategori rendah (45,68%).

B. Modal Manusia

Dari hasil penelitian diketahui bahwa modal manusia yang dimiliki oleh masyarakat desa sekitar areal pencadangan HTR di Kabupaten Sarolangun termasuk dalam kategori sedang (45,68%). Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang rendah (80,25%), tingkat pengetahuan yang sedang (37,03%) dan tingkat pendidikan yang sedang (80,85%).

Bila ditinjau dari tingkat pendapatan responden, maka sebagian besar responden (80,25%) berada dalam kategori rendah dengan pendapatan rata-rata Rp 10 juta/tahun. Pendapatan rata-rata responden tertinggi adalah Rp 12,68 juta/tahun terdapat di Desa Lamban Sigatal dan rata-rata pendapatan terendah adalah Rp 6,83 juta/tahun di Desa Seko Besar. Jumlah pendapatan ini masih jauh dari kategori dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (Rp 32 juta/tahun).

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh pendidikan formal dan pendidikan informal (pelatihan dan studi banding). Bila dilihat lebih lanjut, tingkat pendidikan formal masyarakat di daerah sekitar kawasan HTR termasuk kedalam kategori sedang yaitu sebanyak 65,43%

masyarakat mengecap pendidikan hingga SD dan SMP. Bahkan 19,75% masyarakat telah menyelesaikan pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan formal yang baik ini menandakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka cukup tinggi sehingga dapat menjadi faktor kunci yang penting bagi pengembangan kegiatan HTR di daerah tersebut. Namun tingkat pendidikan informal sangat rendah karena 76,54% responden tidak pernah mengikuti pendidikan informal khususnya bidang kehutanan.

Tingkat pengetahuan yang diukur dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat mengenai implementasi kebijakan HTR, termasuk ketentuan yang ada dalam perundangan-undangan. Persentase tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan HTR dengan kategori tinggi terdapat di Desa Taman Bandung yaitu 55,17%. Hal ini disebabkan karena desa ini pernah menjadi

lokasi percontohan areal HTR di Jambi sehingga pernah dilaksanakan sosialisasi secara intensif, sedangkan Desa Lamban Sigatal masuk ke dalam kategori sedang (52%) dan Desa Seko Besar masuk ke dalam kategori rendah (70,37%).

C. Modal Sosial

Menurut Putnam (1995) modal sosial adalah jejaring kerja (*network*), norma dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi untuk mendapatkan keuntungan bersama. Unsur-unsur modal sosial yang diukur dalam penelitian ini meliputi (1) kepercayaan terhadap sesama, (2) kepatuhan terhadap norma, (3) kepedulian antar sesama dan (4) keterlibatan dalam organisasi sosial. Tabel 1 menyajikan modal sosial yang dimiliki responden dalam implementasi HTR di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Tabel 1. Modal sosial
 Table 1. Social capital

Indikator (<i>Indicators</i>)	Tinggi (<i>High</i>)		Sedang (<i>Middle</i>)		Rendah (<i>Low</i>)	
	n	%	n	%	N	%
Kepercayaan terhadap sesama (<i>Trust</i>)	12	14,81	38	46,91	31	38,27
Kepatuhan terhadap norma (<i>Norms</i>)	10	37,04	12	44,44	5	18,52
Kepedulian antar sesama (<i>Solidarity</i>)	40	49,38	34	41,98	5	6,17
Keterlibatan dalam organisasi sosial (<i>Network</i>)	8	9,88	61	75,31	12	14,81
Modal Sosial (<i>Social capital</i>)	13	16,05	43	53,08	25	30,86

1. Kepercayaan terhadap sesama (*Trust*)

Kepercayaan adalah sikap saling mempercayai di masyarakat (Fukuyama, 2007). Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat termasuk dalam kategori sedang (46,91%), di mana 41% masyarakat mudah percaya terhadap orang yang berasal dari desa yang sama, namun 61%

reponden mengaku susah percaya orang asing. Perbedaan suku dan agama tidak mempengaruhi tingkat kepercayaan responden, namun sebagian besar masyarakat (70,37%) berhati-hati untuk percaya pada orang lain bila berhubungan dengan uang. Kondisi ini menurut 53% responden sama saja dengan kondisi 5 tahun yang lalu.

Mayoritas masyarakat mudah percaya kepada aparat pemerintah. Diketahui bahwa 88,89% responden mudah percaya kepada guru dan 61,73% responden mudah percaya pada pemerintah daerah. Meskipun demikian, 50,62% responden mengaku berhati-hati untuk percaya kepada pemerintah pusat dan susah percaya kepada polisi (38,27%).

Meskipun 75,31% responden mengaku berhati-hati percaya dengan orang asing, namun sebagian besar responden (43,21%) mengaku mudah percaya dengan LSM/NGO. Hal ini disebabkan karena lokasi ini sering mendapatkan sosialisasi dan pendampingan dari beberapa LSM terkait kehutanan, pertanian dan lingkungan hidup.

2. Kepatuhan terhadap norma (*Norms*)

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma termasuk dalam kategori tinggi (49,38%). Ini berarti masyarakat masih sangat mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam lingkungan mereka, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, 67,3% masyarakat menggunakan hukum adat dalam memutuskan sebuah perkara (termasuk bidang kehutanan), sedangkan sisanya, 24,69% menggunakan hukum pemerintah dan 13,58% menggunakan hukum agama. Masyarakat Desa Lamban Sigatal dan Taman Bandung umumnya lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dalam memutuskan suatu perkara, sementara masyarakat Desa Seko Besar memilih untuk menggunakan hukum Pemerintah. Hal ini diduga karena Desa Seko Besar merupakan areal transmigrasi dengan penduduk mayoritas adalah pendatang (dari Jawa, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan), sehingga merasa kurang cocok dengan hukum adat Jambi yang digunakan oleh masyarakat pribumi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kepedulian pada sesama (*Solidarity*)

Tingkat kepedulian masyarakat kepada sesama cukup tinggi (51,85%). Hal ini dapat dilihat dari tingkat keakraban yang sedang (59,26%) dan keinginan untuk saling membantu yang tinggi (66,67%). Tingkat keakraban dapat dilihat dari banyaknya jumlah teman akrab yang dimiliki oleh responden dan jumlah orang yang mau membantu bila mereka dalam kesusahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 65,43% responden memiliki teman akrab lebih dari lima orang dan 50,61% responden merasa aman meninggalkan keluarga bila ingin bepergian jauh karena lebih dari lima orang yang bersedia menjaga anak mereka.

Bila dilihat dari desa asal responden diketahui bahwa tingkat kepedulian masyarakat di Desa Lamban Sigatal masuk dalam kategori tinggi (48%), sedangkan tingkat kepedulian masyarakat Desa Seko Besar dan Desa Taman Bandung masuk dalam kategori sedang (37,03% dan 48,27%). Tingginya tingkat kepedulian di Desa Lamban Sigatal diperkirakan karena Desa tersebut merupakan desa asli (bukan lokasi transmigrasi) sehingga tingkat keragaman masyarakat (suku dan agama) rendah dan hubungan kekerabatan antar masyarakat tinggi. Dengan kata lain, rata-rata penduduk Desa Lamban Sigatal masih bersaudara satu sama lainnya.

4. Keterlibatan dalam organisasi sosial (*Network*)

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial masuk dalam kategori sedang (49,38%). Mayoritas masyarakat cukup aktif (47%) dalam berbagai kegiatan, terutama pengajian mingguan/bulanan dan arisan. Masyarakat desa umumnya bekerja di ladang yang jauh dari rumah mereka, sehingga sebagian besar harus menginap di ladang. Mereka akan pulang pada hari jumat siang

untuk melakukan ibadah pada hari jumat dan melakukan kegiatan sosial pada hari sabtu dan minggu.

Meskipun sebagian besar waktu dihabiskan di ladang, namun 6,17% responden mengaku terlibat dalam lebih dari tiga organisasi sosial. Organisasi sosial yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat desa adalah kelompok tani (46,91%), pengajian (34,57%), etnis (12,34%), kepemudaan (3,7%) dan PNPM Mandiri Pedesaan (2,47%). Salah satu organisasi sosial yang ada di masing-masing desa asal responden adalah kelompok tani. Organisasi ini umumnya dibentuk untuk memudahkan komunikasi masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Di Desa Lamban Sigatal, kelompok tani dibentuk dalam rangka pengembangan jernang, sedangkan di Desa Taman Bandung kelompok tani dibentuk dalam rangka pengembangan HTR. Belakangan, di Desa Lamban Sigatal mulai dibentuk kelompok tani HTR.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi yang diikutinya termasuk dalam kategori tinggi (48,15%). Meskipun tingkat keaktifan masyarakat dalam berorganisasi termasuk dalam kategori sedang (48,25%) dan 38,37% dari responden mengakui bahwa pada mulanya mereka mengikuti sebuah organisasi karena diundang, namun keikutsertaan mereka dalam sebuah organisasi dalam 1 (satu) tahun terakhir berada dalam kategori tinggi (50,62%). Tingkat keaktifan masyarakat Desa Taman Bandung pada saat inisiasi HTR baru dimulai (tahun 2007-2009) sangat tinggi. Pertemuan mingguan selalu dilaksanakan untuk membahas berbagai hal mengenai HTR. Namun saat ini tingkat keaktifan masyarakat sudah sangat menurun, meskipun beberapa responden mengaku kelompok mereka tetap aktif melakukan pertemuan-pertemuan.

Tingkat kerjasama masyarakat tergolong tinggi (41,98%), baik kerjasama dalam kelompok (48,15%) maupun kerjasama dengan

kelompok lain (53,09%). Setiap keputusan yang akan diambil dalam sebuah kelompok, umumnya (48,15%) akan didiskusikan terlebih dahulu dalam kelompok untuk mendapatkan keputusan bersama.

Berkaitan dengan kebijakan HTR, 54,32% responden mengaku bahwa telah dilakukan penyuluhan dalam salah satu organisasi sosial (kelompok) yang mereka ikuti. Namun karena tingkat implementasi kebijakan HTR masih sangat rendah, hanya 11,11% responden yang mengakui bahwa organisasi yang mereka ikut terlibat aktif dalam kegiatan HTR.

A. Partisipasi Pelaku Kebijakan dalam Implementasi HTR

Lokasi pencadangan HTR Kabupaten Sarolangun ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 386/KPTS-II/2008 tanggal 7 November 2008 seluas 18.840 ha. Namun perkembangan penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) di Kabupaten Sarolangun sangat lambat. Hingga Mei 2011 atau dalam kurun waktu 2,5 tahun sejak dikeluarkannya SK pencadangan, baru 0,82% dari keseluruhan areal tersebut yang sudah diterbitkan ijinnya oleh Bupati. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan diketahui bahwa realisasi IUPHHK-HTR di Kabupaten Sarolangun pada bulan Maret 2009 seluas 44 ha dan 110,66 ha pada bulan Maret 2010. IUPHHK-HTR tersebut diberikan kepada empat kelompok tani hutan (KTH), yaitu: 52,72 ha untuk KTH Maju Jaya, 31,09 ha untuk KTH Usaha Tani, 50 ha untuk KTH Bukit Lintang dan 20,85 ha untuk KTH Sumber Rejeki.

Implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sarolangun dimulai sejak tahun 2007, melalui proses fasilitasi yang dibangun oleh EC Indonesia FLEGT-SP di Desa Taman Bandung. Proyek ini dilaksana-

kan sebagai dukungan terhadap kebijakan pembangunan HTR berupa upaya perumusan model pembangunan HTR yang tepat untuk Indonesia. Proyek ini memfasilitasi pendanaan untuk penguatan kelembagaan pemohon (masyarakat) mulai dari pembentukan kelompok/koperasi hingga kegiatan permohonan IUPHHK-HTR. Di Kabupaten Sarolangun, desa yang mendapatkan fasilitasi adalah Desa Taman Bandung. Hasil yang terlihat dari proses fasilitasi ini adalah diberikannya IUPHHK-HTR kepada 6 kelompok tani (168 ha) dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak diterbitkannya SK Menhut tentang HTR.

Hal yang patut disayangkan adalah berhentinya proses implementasi HTR setelah dikeluarkannya SK IUPHHK HTR, karena ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola lahan yang telah menjadi haknya. Namun demikian, upaya pemerintah daerah untuk mengimplentasikan kebijakan HTR terus berlanjut dengan dilaksanakannya penyuluhan

dan pendampingan dalam rangka percepatan HTR. Hingga saat ini, disamping masyarakat Desa Taman Bandung yang telah memiliki IUPHHK-HTR, beberapa desa lain baru memulai proses implementasi kebijakan ini dengan membentuk kelompok tani hutan dan mengumpulkan persyaratan guna mendapatkan IUPHHK-HTR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54,32% responden memutuskan untuk ikut serta dalam kegiatan HTR. Ikut serta yang dimaksud adalah mereka yang telah memiliki ijin pengelolaan HTR atau sedang dalam proses pengurusan ijin HTR. Namun keputusan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan HTR bukan berarti mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan implementasi HTR. Oleh karena itu tingkat partisipasi perlu mendapatkan perhatian, karena seringkali terjadi partisipasi palsu dan program tetap dilaksanakan secara *top down*. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan HTR di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan tingkat partisipasi dalam kegiatan HTR
Table 2. Responden distribution of participation levels in htr activity

Kriteria (Criteria)	Kegiatan HTR (<i>HTR Aactivity</i>)								Total kegiatan <i>Total activity</i>	
	Perencanaan (<i>Planning</i>)		Pelaksanaan (<i>Conducting</i>)		Pemanfaatan <i>Using</i>		Pemeliharaan dan evaluasi <i>Evaluation</i>			
	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tinggi (<i>High</i>)	11	13,58	3	3,70	0	0,00	0	0,00	1	1,23
Sedang (<i>middle</i>)	20	24,69	29	35,80	3	3,70	11	11,11	14	17,28
Rendah (<i>Low</i>)	50	61,73	49	60,49	78	96,30	72	88,89	66	81,48

Derajat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi menurut Dusseldorp (1981) masuk ke dalam kategori partisipasi terinduksi. Partisipasi masyarakat tumbuh sebagai akibat adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh atau dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.

Berdasarkan tingkatan partisipasi Arnstein (1969), maka partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan HTR di Desa Lamban Sigatal dan Desa Seko Besar memasuki tahap pemberian informasi (*informing*). Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan *tokenism*. Pada tahap ini terdapat dua karakteristik yang bercampur.

Pemberian informasi pada masyarakat di satu sisi merupakan langkah awal partisipasi, namun di sisi lain tidak ada ruang bagi masyarakat memberikan umpan balik (*feedback*) merupakan ciri *tokenism*.

Proses partisipasi di Desa Taman Bandung yang telah memasuki level konsultasi (*consultation*). Komunikasi telah berlangsung dua arah antara pemerintah daerah dengan masyarakat, di mana masyarakat (meskipun hanya beberapa orang) telah mulai dapat diajak untuk berdiskusi mengenai kendala-kendala yang mereka hadapi dan apa yang mereka butuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan HTR. Meskipun memang tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide mereka akan dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijakan HTR.

E. Hubungan Antar Peubah

1. Hubungan antara modal fisik dan modal manusia dengan modal sosial

Lawang (2004) menyebutkan bahwa modal fisik dan modal manusia mempunyai hubungan yang erat dengan modal sosial. Modal fisik dapat mendukung proses produksi yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan dan memungkinkan orang untuk meningkatkan investasi, sedangkan modal manusia dapat mengerakkan modal personal dalam meningkatkan kesadaran diri, pengaturan diri dan motivasi. Semakin tinggi modal manusia semakin besar peluang untuk membentuk modal sosial.

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara unsur-unsur pembentuk modal fisik dan modal manusia dengan unsur-unsur pembentuk modal sosial digunakan korelasi peringkat spearman (Tabel 3).

Tabel 3. Hubungan antara modal fisik dan modal manusia dengan modal sosial
 Table 3. Correlation between physical capital and human capital with social capital

No	Modal fisik dan Modal manusia (<i>Physical capital and Human capital</i>)	Modal social (<i>Social capital</i>)			
		<i>Trust</i>	<i>Norms</i>	<i>Solidarity</i>	<i>Network</i>
1	Kepemilikan lahan	0,047	0,029	0,086	0,114
2	Ketersediaan areal	-0,050	-0,176	-0,082	0,084
3	Keberadaan tanaman	-0,053	0,171	-0,152	0,050
4	Tingkat pendidikan	0,244*	0,045	0,055	0,141
5	Tingkat pendapatan	0,085	0,103	0,231*	0,021*
6	Tingkat pengetahuan	0,233*	-0,373**	0,057	0,055

Keterangan (*remarks*): * korelasi nyata pada taraf 0,05 (*correlation is significant at 0,05 level*)
 ** korelasi nyata pada taraf 0,01 (*correlation is significant at 0,01 level*)

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak didapatkan hubungan antara modal fisik dengan modal sosial, sementara modal manusia berkorelasi baik positif maupun negatif. Tingkat pendapatan seseorang berkorelasi positif dengan tingkat kepeduliannya terhadap sesama dan keterlibatan dalam organisasi

sosial. Hal ini berarti bahwa semakin besar pendapatan seseorang, kesempatan mereka untuk membantu sesama lebih banyak. Siswiyanti (2006) menyebutkan bahwa pendapatan yang tinggi cenderung membuat orang berpartisipasi lebih dibandingkan dengan masyarakat dengan pendapatan rendah

yang cenderung memiliki kesempatan yang terbatas.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan terhadap sesama dan keterlibatan dalam organisasi sosial. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan seseorang maka pemikirannya semakin terbuka dan pengalaman yang dimilikinya umumnya lebih banyak sehingga mereka akan semakin mudah untuk mempercayai orang lain.

Tingkat pengetahuan seseorang berkorelasi negatif dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap norma. Kebijakan HTR yang memandang kawasan hutan produksi adalah milik negara, yang dapat dikelola oleh masyarakat dengan ijin tertentu. Hal ini bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah mengakui (*secara de facto*) lahan hutan produksi sebagai lahan milik.

2. Hubungan antara Modal sosial dengan Partisipasi masyarakat

Salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan HTR adalah tingkat

partisipasi masyarakat. Keputusan seseorang untuk ikut berpartisipasi atau tidak dalam suatu kegiatan dipengaruhi oleh karakteristik individu tersebut dan karakteristik program yang ditawarkan. Pregernig (2002) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa keputusan seseorang untuk berpartisipasi bukan hanya dipengaruhi oleh faktor obyektif (seperti tingkat kerusakan lahan) tetapi juga faktor subyektif (urgensi dari program tersebut).

Partisipasi masyarakat juga erat kaitannya dengan modal sosial. Semakin tinggi modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, dapat mendorong warga atau kelompok masyarakat untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kolektif. Ketiadaan modal sosial menjadi halangan besar bagi masyarakat untuk bekerjasama dengan orang lain di sebuah organisasi atau komunitas. Keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan HTR memerlukan tindakan kolektif yang berdasar pada partisipasi masyarakat. Hubungan antara modal sosial dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan antara modal sosial dengan partisipasi masyarakat
Table 4. Correlation between social capital and community participation

No	Korelasi (<i>Correlation</i>)	Kegiatan HTR (<i>HTR activity</i>)				Total partisipasi (<i>Total participation</i>)
		Perencanaan (<i>Planning</i>)	Pelaksanaan (<i>Conducting</i>)	Pemanfaatan (<i>Utilization</i>)	Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	
1	<i>Trust</i>	0,132	0,045	-0,179	0,072	0,025
2	<i>Norms</i>	-0,364**	-0,282	0,056	-0,125	-0,290**
3	<i>Solidarity</i>	0,029	0,092	0,084	0,042	0,038*
4	<i>Network</i>	0,129	0,269*	0,194	0,124	0,232*

Keterangan (*Remark*): * korelasi nyata pada taraf 0,05 (*correlation is significant at 0,05 level*)
 ** korelasi nyata pada taraf 0,01 (*correlation is significant at 0,01q level*)

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berkorelasi positif dengan keterlibatan dalam organisasi sosial dan kepedulian terhadap sesama, namun berkorelasi negatif dengan kepatuhan terhadap norma. Hal ini membuktikan bahwa kelompok sosial yang dibangun oleh masyarakat bermanfaat dalam implementasi kebijakan HTR. Masyarakat yang tergabung dalam sebuah kelompok sosial secara bersama-sama akan membentuk aksi kolektif dalam mendukung implementasi kebijakan HTR.

F. Strategi Implementasi Kebijakan HTR

Implementasi kebijakan HTR memerlukan strategi yang tepat agar tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat. Keputusan yang diambil dalam menyusun strategi implementasi harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari aspek modal fisik, modal manusia dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, maupun kondisi lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan analisis SWOT terhadap evaluasi faktor internal (IFE) serta evaluasi terhadap faktor eksternal (EFE), maka kecenderungan posisi masyarakat dalam lokasi penelitian terhadap implementasi kebijakan HTR berada pada kuadran I (titik 0,550; 1,048).

Kecenderungan posisi masyarakat terhadap faktor internal dan eksternal di bawah nilai rata-rata 2,5, hal ini berarti bahwa faktor-faktor kekuatan yang ada pada masyarakat belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengatasi kelemahan yang ada, di sisi lain masyarakat juga belum mampu merespon dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menghindari ancaman yang terdapat dalam lingkungan mereka (David, 2002).

Berdasarkan kedudukan titik kecenderungan tersebut maka strategi yang akan diterapkan dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan HTR adalah strategi agresif (strategi S-O), yang didasarkan pada pemanfaatan seluruh

kekuatan (*strengths*) yang ada pada masyarakat secara internal dan kondisi eksternal yang menjadi pendukungnya (*opportunity*). Pada strategi ini, kebijakan HTR akan diimplementasikan dengan menghindari faktor-faktor yang bersifat ancaman dan mengembangkan peluang yang ada, dengan segenap kekuatan yang dimiliki masyarakat meskipun secara internal mereka juga mempunyai beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan HTR.

Tahap pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan matriks QSPM. QSPM membutuhkan penilaian yang baik dan obyektif menggunakan skor ketertarikan atau *attractiveness score* (AS). Pemberian skor ketertarikan (AS) dilakukan oleh *stakeholders* yang berkompeten sehingga obyektivitas dapat dipertahankan (David, 2002). Hasil matriks QSPM menunjukkan bahwa strategi prioritas alternatif yang terpilih adalah alternatif pertama mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai motivasi agar masyarakat mau berpartisipasi dalam kebijakan HTR (nilai total skor ketertarikan (TAS) adalah 6,583). Alternatif strategi kedua adalah mengotimalkan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi melalui percepatan proses perijinan, pendampingan dan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya HTR untuk masyarakat (nilai TAS 5,729). Alternatif ketiga adalah menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran ke PT Samhutani sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu (Nilai TAS 5,697).

Berbeda dengan penelitian Herawati (2010) yang mengungkapkan bahwa minat masyarakat di Kalimantan Selatan cukup tinggi terhadap HTR karena adanya kebutuhan akan lahan, masyarakat di Kabupaten Sarolangun telah menguasai semua lahan yang dicadangkan sebagai areal HTR. Keikutsertaan masyarakat dalam HTR tidak dipengaruhi

oleh kepemilikan lahan mereka (*secara de facto*). Oleh karena itu, strategi pertama sangat membantu keberhasilan implementasi HTR di Kabupaten Sarolangun. Apabila implementasi kebijakan HTR dimulai dengan mengakomodir pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang sedang berlangsung hingga saat ini (menanam dan memanen tanaman karet), maka ketakutan masyarakat akan nasib tanaman karet mereka akan teratasi. Di sisi lain, secara tidak langsung masyarakat juga mengakui bahwa lahan yang mereka garap adalah milik pemerintah (hutan negara) dengan mengikuti program HTR.

Schneck (2009) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan HTR selain kurangnya kemampuan masyarakat adalah kurangnya dukungan dari institusi pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan HTR. Kondisi di lapangan di Sarolangun, dukungan pemerintah daerah termasuk dalam kategori sedang. Hal ini akan menjadi peluang yang bagus bila dimanfaatkan sebaik mungkin, karena dukungan pemerintah daerah akan memberikan dampak yang sangat *significant* dalam keberhasilan implementasi HTR. Strategi kedua merupakan alternatif strategi yang sesuai untuk memanfaatkan dukungan pemerintah daerah tersebut.

Mutaqin (2008) mengemukakan bahwa penyediaan pasar yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar hutan merupakan fokus utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, isu mengenai kelangkaan kayu dan pemasaran dapat dijadikan rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu, di samping tanaman karet yang telah ditanam mereka sejak dahulu.

IV. KESIMPULAN

1. Modal yang dimiliki oleh masyarakat termasuk dalam kategori sedang, baik modal fisik (44%), modal manusia (46%) dan modal sosial (53%). Dengan modal yang cukup ini, diharapkan implementasi kebijakan HTR yang menuntut peran sentral masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara modal fisik dan modal sosial. Ini berarti bahwa interaksi antar sesama masyarakat di lokasi penelitian tidak tergantung kepada modal fisik yang dimiliki oleh masing-masing individu.
3. Terdapat hubungan yang nyata antara modal manusia dengan modal sosial. Hubungan positif terjadi pada tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan terhadap kepercayaan terhadap sesama dan tingkat pendapatan terhadap tingkat kepedulian terhadap sesama dan keterlibatan dalam organisasi sosial. Hubungan negatif terjadi antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan.
4. Terdapat hubungan yang nyata antara modal sosial dan tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat berkorelasi positif dengan keterlibatan dalam organisasi sosial dan kepedulian terhadap sesama, namun berkorelasi negatif dengan kepatuhan terhadap norma.
5. Strategi yang dapat dikembangkan dalam implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Sarolangun adalah: (1) mengakomodasi pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai motivasi agar masyarakat mau berpartisipasi dalam kebijakan HTR; (2) mengotimalkan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi melalui percepatan proses perijinan, pendampingan dan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya HTR untuk

masyarakat; dan (3) menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran ke PT Samhutani sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu.

V. SARAN

1. Kebijakan hutan tanaman rakyat merupakan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan hutan tanaman rakyat tidak dapat secara sentralisasi tanpa melihat *local specific* yang dimiliki oleh masyarakat kelompok sasaran HTR, namun harus mempertimbangkan modal-modal yang dimiliki oleh masyarakat termasuk modal fisik, modal manusia dan modal sosial masyarakat selaku kelompok sasaran kebijakan HTR.
2. Terkait strategi implementasi terpilih, hendaknya Kementerian Kehutanan dapat mempertimbangkan kembali peraturan mengenai budidaya tanaman HTR yang menyebutkan bahwa tanaman budidaya berkayu (termasuk karet) paling luas hanya 40% dari areal HTR, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi tanaman karet merupakan primadona masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, P.S and Seok, W.K. 2002. Social capital: prospect for a new concept. *Academy of Management Journal* 27(1):17.
- Arnstein, S. 1969. A ladder of citizen participation. *Journal of American Institute of Planners*, 35:216-224.
- Awang SA et al. 2001. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Cetakan pertama. Yogyakarta: CV Debut Press.
- Coleman, J. 1988. Social Capital in Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology* 94 (supplement): pp S95-S120.
- David, F.R. 2002. *Strategic Management : Concepts and Cases*. 8th edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Dusseldorp. D.B.W.M. 1981. *Participation in Planned Development Influence by Governments Developing Countries at Local Level in Rural Areas*. Wageningen: Agricultural University.
- Fukuyama F. 2007. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Ruslani, penerjemah. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Qalam. Terjemahan dari: *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*.
- Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V.N., and Woolcock, M. 2004. *Measuring Social Capital an Integrated Questionnaire*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Herawati, T. 2010. Analisis respon pemangku kepentingan di daerah terhadap kebijakan hutan tanaman rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7(1):3-25.
- Hakim, I. 2009. Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: sebuah terobosan dalam menata kembali konsep pengelolaan hutan lestari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6(1):27-41.
- Harjanto, 2002. Mutu modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 6:65 71.
- Krishna, A. and Shrader, E. 1999. Social Capital Assessment Tool. Makalah pada: Conference on Social Capital and Poverty Reduction, Washington DC: June 22-24, 1999. The World Bank.
- Lawang, R.M.Z. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press.

- Muttaqin, M.Z. 2008. Good governance dalam lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan* 5(3): 143-151.
- Pranadji. T. 2006. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agro-ekosistem lahan kering. *Jurnal Agro Ekonomi* 24:178206.
- Pregernig, M. 2002. Perceptions, not facts: how forestry professional's decide on the restoration of degraded forest ecosystems. *Journal of Environmental Planning and Management* 45(1):2538.
- Putnam, R. 1995. Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy* 6 (1):65-78.
- Rangkuti F. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Schneck, J. 2009. Assessing the viability of HTR-Indonesia community based forest plantation program. [Tesis]. Master Project Submitted of Fulfillment of The Requirements for The Master of Environmental Management of Duke University.
- Siswiyanti Y. 2006. Hubungan karakteristik anggota masyarakat sekitar hutan dan beberapa faktor pendukung dengan partisipasinya dalam pelestarian hutan di KPH Parung Panjang Kabupaten Bogor. [Tesis]. Bogor: Sekolah Pasca-sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Suharto E. 2007. *Modal Sosial dalam Kebijakan Publik*. Di dalam: Sugeng B dan Susantyo B, editor. *Bunga Rampai Modal Sosial dalam Pembangunan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. hlm 1 14.
- Sumanto, S.E. 2009. Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 6(1):13-25.
- Syahyuti. 2002. Ikatan genealogis dan pembentukan struktur agraria: Kasus pada masyarakat pinggiran hutan di Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. *Jurnal Agro Ekonomi* 20 (1).
- Weyerhaeuser, H., Kahrl, F and Su, Y. 2006. Ensuring a feature for collective forestry in china's southwest: adding human and social capital to policy reforms. *Science Direct, Forest Policy and Economics* 8:375-385.